

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Di Bawah Ancaman Air Bah

Warga yang terkena dampak proyek normalisasi Ciliwung meminta ganti rugi tinggi.

Francisco Rosarians
francisco@tempo.co.id

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan permukiman di bantaran Ciliwung yang belum tersentuh proyek normalisasi terus berada di bawah ancaman banjir. Berdasarkan data mereka, tinggi banjir di wilayah tersebut lebih dari 50 sentimeter saat banjir besar melanda Jakarta awal tahun ini.

“Air dari sungai langsung merendam wilayah mereka, tak ada yang menahan,” ujar Bambang Hidayah, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian PUPR, kepada *Tempo*, kemarin. “Air banjirnya juga bertahan sehari-hari. Mereka akan terus begitu.”

Menurut dia, terdapat empat kelurahan di Jakarta Selatan yang terendam banjir antara 50 dan 100 sentimeter akibat luapan Ciliwung pada malam pergantian tahun, yaitu Kelurahan Manggarai, Kebon Baru, Rawajati, dan Pejaten Timur. Sedangkan di Jakarta Timur, lima kelurahan terendam air sehari-hari hingga 2 meter, yaitu Kelurahan Kebon Manggis, Kampung Melayu, Bidarcina, Cililitan, dan Balekambang. “Normalisasi ini kan tidak rata. Di satu kelurahan ada yang sudah, tapi ada juga yang belum. Dari titik-titik ini, air banjir masuk,” kata Bambang.

Berdasarkan data Balai Besar Ciliwung Cisadane, panjang bantaran Ciliwung yang akan digarap untuk normalisasi di wilayah

DKI Jakarta adalah 19,9 kilometer. Sementara itu, rencana pembuatan tanggul di dua sisi badan sungai mencapai 33,69 kilometer. Namun realisasi proyek tersebut baru 16,19 kilometer.

Dari jumlah tersebut, pemerintah DKI seharusnya membebaskan lahan yang terkena dampak proyek seluas 46,47 hektare. Namun yang sudah dieksekusi baru 16,04 hektare. Tahun ini, DKI hanya mampu menambah 118 bidang tanah. “Kalau pembebasan lahan berlangsung tahun ini, proyek normalisasi baru bisa selesai 2022. Jadi, semakin lama pembebasan, lebih lama lagi normalisasinya,” ujar Bambang.

Haryono, warga di Rukun Tetangga 05, Kelurahan Cililitan, mengatakan pemerintah DKI pernah mensosialisasi rencana normalisasi dan memberi janji pembayaran ganti rugi. Namun, menurut dia, tak pernah ada kepastian tentang nominal dan waktu angkat kaki.

Dia mengatakan seluruh wilayah di Kelurahan Cililitan yang dekat dengan Ciliwung terendam banjir sekitar 50-150 sentimeter pada awal Januari lalu. Menurut Haryono, mereka sebenarnya sudah menyatakan dukungan terhadap proyek normalisasi karena memberi harapan berhentinya ancaman banjir di wilayah tersebut.

Toh, kata dia, warga yang rumahnya terkena proyek bisa mendapat ganti rugi dari pemerintah. “Sejauh ada ganti rugi yang cocok, pasti warga mau pindah. Supaya banjir berhenti,” ujar Haryono.

Segendang sepenarian, Herman, warga RW 07,

Kelurahan Pejaten Timur, mengatakan wilayah tempat tinggalnya yang nyaris menempel dengan bibir sungai menjadi langganan banjir setiap musim hujan. Awal tahun ini, dia dan keluarganya malah sampai mengungsi akibat banjir setinggi 2 meter.

Hermanpun menyatakan siap menjalani tawaran relokasi dengan syarat pembayaran ganti rugi yang sesuai. “Kami cuma warga. Taat saja. Tapi, ya, ganti ruginya harus adil,” kata dia.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Juaini Yusuf mengatakan salah satu persoalan lambatnya pembebasan lahan karena kelengkapan administratif warga pemilik tanah yang minim. Dia menyatakan pembayaran ganti rugi sulit berlangsung selama dokumen kepemilikan dan ketaatan pajak tak lengkap. “Penetapan lokasi pembebasan lahan sudah keluar, tapi warga sendiri surat-suratnya bermasalah,” kata Juaini.

● IMAM HAMDI

“Kalau pembebasan lahan berlangsung tahun ini, proyek normalisasi baru bisa selesai 2022. Jadi, semakin lama pembebasan, lebih lama lagi normalisasinya.”

Menanti Pembebasan

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunggu Pemerintah Provinsi DKI membebaskan lahan di bantaran Ciliwung. Pemerintah ingin menuntaskan program normalisasi yang terhenti sejak awal kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, 2,5 tahun lalu. DKI berjanji menuntaskan pembebasan lahan di 118 bidang tanah tahun ini.

Normalisasi Ciliwung

Total : 33 kilometer
Selesai : 16 kilometer
Sisa : 17 kilometer
tersebar di sejumlah kelurahan di Jakarta Timur dan Selatan

■ Gedong

Bidang : 23
Luas : 16.112 meter persegi

■ Balekambang

Bidang : 45
Luas : 37.768 meter persegi

■ Cililitan

Bidang : 14
Luas : 4.727 meter persegi

■ Cawang

Bidang : 15
Luas : 4.813 meter persegi

■ Kampung Melayu

Bidang : 10
Luas : 1.399 meter persegi

■ Tanjung Barat

Bidang : 11
Luas : 3.851 meter persegi

■ Pejaten Timur

Bidang : 152
Luas : 71.936 meter persegi

■ Bukit Duri

Bidang : 1
Luas : 75 meter persegi

● FRANCISCO ROSARIANS